

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai prosedur penyusunan dana pokok pikiran pada kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pokok Pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan Pokir DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana.
2. Anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat melalui kegiatan kunjungan secara berkala dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis terhadap konstituen di daerah pemilihannya.
3. Dana Pokok Pikiran akan memberikan dampak positif kepada masyarakat apabila dana tersebut memang tepat sasaran ditujukan kepada hal-hal yang memang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah.
4. Aplikasi SIPD mempermudah pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan sistem informasi berupa kompilasi data-data yang dapat di pertanggungjawabkan yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk media informasi yang efektif, proporsional dan akuntabel, yang dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengaksesnya.

1.2. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi harus lebih menekankan kepada Anggota DPRD untuk lebih tepat waktu dalam memberikan usulan pikir, karena banyak keterlambatan dari Anggota DPRD dalam memberikan usulan pikir yang mengakibatkan lamanya proses verifikasi kepada Badan Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bukittinggi.
2. Kepada Anggota DPRD Kota Bukittinggi harus memasukkan usulan yang sesuai dengan kriteria usulan pikir dan persyaratannya, agar usulan pikir tersebut memenuhi persyaratan dan bisa di verifikasi dan di masukkan kedalam RKPD Pemerintah Kota Bukittinggi.

